UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Akibat Kegagalan Pelindungan Data
Pribadi Oleh Pemerintah**
MUHAMMAD FATKHURRAHMAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amirudin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama. 2023.

Hadjon, Philipus M, *et al*. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2025.

Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.

Marbun, SF, dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2011.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2024.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1981.

Nugraha, Purna Cita. *Yurisdiksi Dalam Hukum Siber*. Bandung: PT Refika Aditama. 2022.

Rosadi, Sinta Dewi. Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2024.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2014.

Yuniza, Mailinda Eka, *et al*, Hukum PTUN (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025)

Artikel Jurnal

Abrianto, Bagus Oktafian, *et al*. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" *Negara Hukum* 11, No. 1 (2020): 43-62

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Oleh Pemerintah
MUHAMMAD FATKHURRAHMAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Bua, Imanuel Toding, dan Nur Isdah Idris. "Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024" *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2. No. 2 (Mei 2025): 100-114.

Djumikasih. "Model Pencantuman Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52. No.3 (September 2022): 768-780

Ermawati, Swi Wahyuni. "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia" *Justices: Journal of Law* 3. No. 1 (2024): 47-57.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido* 01. No.1 (Juli 2019): 13-22.

Muabezi, Zaherman Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaats) Bukan Kekuasaan (Machsstaat)", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 3 (November 2017): 426.

Nainggolan, Riska Putri, *et al*. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia" *Capitan: Constitutional Law & Administrative Law Review* 3. No. 1 (Juni 2025): 54-65.

Rosadi, Sinta Dewi, *et al*. "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura" *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1. No. 3 (Agustus 2023): 01-27.

Rosadi, Sinta Dewi, *et al*. "Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris" *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9. No. 2 (Desember 2023): 207-223.

Rosadi, Sinta Dewi, *et al*. "Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia dengan Irlandia dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi" *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3. No. 2 (Mei 2025): 51-71.

Rosadi, Sinta Dewi, *et al*. "Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi" *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3. No. 2 (Juli 2025): 739-749.

Syofyan, Yunita, *et al*. "Tanggung Gugat Pemerintah Atas Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi" *Nagari Law Review* 8. No. 3 (April 2025): 556-581.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Oleh Pemerintah
MUHAMMAD FATKHURRAHMAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

Yuniza, Mailinda Eka, dan Melodia Puji Inggarwati. "Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan" *Jurnal De Jure* 13. No. 2 (Oktober 2021): 2655-4348.

Artikel dalam Antologi

Efendi, Virga Dwi, *et al*, "Perizinan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Antara Regulasi dan Implementasi", dalam *Hukum Perizinan Perkembangan dan Catatan Evaluatif Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja*, ed. Richo Andi Wibowo (Malang: Setara Press, 2026),

Tesis

Said, Muhammad Luthfi. "Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum". Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2019.

Internet

Adi Ahdiat, "Kebocoran Data RI Terbanyak dari Sektor Pemerintahan", databoks.katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/f2b65112cfdccc4/kebocoran -data-ri-terbanyak-dari-sektor-pemerintahan. (diakses 11 April 2026)

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi". bphn.go.id. https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf (diakses 23 April 2026).

Biro Humas Kementrian Kominfo, "Siaran Pers No. 138/HM/KOMINFO/07/2023 Tentang Perkembangan Penanganan Dugaan Kebocoran Data Paspor 34,9 Juta Warga Indonesia", https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-138-hm-kominfo-07-2023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-9-juta-warga-indonesia (diakses 11 September 2025).

KBBI Kemdikbud. "Pengadilan". https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan, (diakses 13 Juni 2025).

Majalah

I Dewa Gede Palguna, "Herrenchiemsee". *Konstitusi*. Maret 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Oleh Pemerintah
MUHAMMAD FATKHURRAHMAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Oleh Pemerintah
MUHAMMAD FATKHURRAHMAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1267).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.